

PEMERINTAH **KABUPATEN TAPIN**



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BKAD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BKAD



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan pengaplikasian Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap instansi Pemerintah harus memiliki Rencana Strategis dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu penyusunan Renstra ini sangat terkait dalam visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dalam rangka ikut andil dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa pada Renstra BKAD ini masih terdapat kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya untuk menjadi lebih baik.

Dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tapin 2025-2029.

Rantau, 19 September 2025

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kab.Tapin



HARIS FADHILAH, SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19740626 200501 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan	II-1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
B. Sumber Daya	II-12
C. Kinerja Pelayanan	II-17
D. Kelompok Sasaran Pelayanan	II-21
E. Mitra BKAD Dalam Memberikan Pelayanan	II-22
F. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja	II-22
G. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat	
Daerah	II-22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-23
A. Permasalahan	II-23
B. Isu Strategis	II-30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1. Tujuan Renstra BKAD	III-5
3.2. Sasaran Renstra BKAD	III-6
3.3. Strategi BKAD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	
.....	III-18
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	
.....	III-22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB II

Tabel 2.1	Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang	II-12
Tabel 2.2	Data ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	II-13
Tabel 2.3	Data Barang Milik Daerah BKAD	II-15
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD	II-19
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi BKAD Lima Tahun Terakhir	II-20
Tabel 2.6	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKAD	II-20
Tabel 2.7	Isu Startegis Perangkat Daerah	II-31
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	II-11
Gambar 2.2	Persentase ASN Berdasarkan Golongan Ruang	II-13
Gambar 2.3	Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	II-14

BAB III

Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD	III-7
Tabel 3.2	Nilai SAKIP	III-10
Tabel 3.3	Penahapan Renstra BKAD	III-22
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan Renstra BKAD	III-25

BAB IV

Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKAD	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-12
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-22
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD	IV-29
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKAD	IV-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tapin, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan hutan luas yang menjadi habitat flora dan fauna khas Kalimantan. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menjadi kekayaan ekologi tetapi juga berpotensi sebagai basis pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sumber daya alamnya yang melimpah menjadi modal utama untuk mendukung berbagai sektor, terutama pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang selama ini menjadi sektor unggulan Kabupaten Tapin. Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Tapin memiliki peran strategis sebagai salah satu penghasil utama padi dan karet di Kalimantan Selatan. Potensi ini menjadikannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan sekaligus penyedia bahan baku bagi industri pengolahan karet. Tidak hanya itu, cadangan batu bara yang melimpah di wilayah ini juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, menjadikannya salah satu penggerak ekonomi lokal yang signifikan. Di sisi lain, Kabupaten Tapin memiliki potensi pariwisata yang menarik dengan keindahan alam serta berbagai situs budaya yang mencerminkan kekayaan warisan lokal. Keberadaan destinasi ini memberikan peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai alternatif pendapatan daerah. Dengan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, potensi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan daerah merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan memiliki peran penting sebagai panduan strategis yang memberikan arah dan fokus, sehingga mampu mendorong

perkembangan dan kemajuan daerah. Perencanaan yang baik tidak hanya membantu mengatur strategi pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pembangunan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, perencanaan merupakan langkah awal sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan arah pembangunan daerah. Memahami hal itu, perencanaan pembangunan daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman bagi berbagai bentuk perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus menyusun perencanaan pembangunan secara terintegrasi. Perencanaan tersebut mencakup jangka panjang, menengah, hingga tahunan, dengan substansi yang saling berkaitan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan dilantikannya H. Yamani, S. AK, ,M.M sebagai Bupati dan H. Juanda sebagai wakil Bupati pada tanggal 20 bulan Februari Tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Tapin periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Tapin harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dalam rangka menjabarkan visi, misi Bupati terpilih dalam kebijakan dan operasionalisasi dokumen RPJMD selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan tiap tahun dalam dokumen RKPD. Dokumen RPJMD ini merupakan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 pada tahap pertama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen strategis yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Penyusunan Renstra merupakan amanat dari berbagai regulasi, terutama Permendagri 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing perangkat daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berkontribusi dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Penunjang keuangan yang dilaksanakan oleh BKAD adalah dalam upaya Pengelolaan Keuangan Daerah, yang keseluruhan kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin yang berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan BKAD selama 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025-2029, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan awal;
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- e. Penyusunan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan Renstra.

Renstra BKAD mempunyai hubungan dengan RPD Kabupaten Tapin sebagai penjabaran teknis dokumen perencanaan dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin. Selain itu hasil dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin juga dimanfaatkan dalam :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
 24. Perda Nomor 3 Tahun 2025 Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142 Tanggal 14 Agustus 2025 Tentang rpjmd Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03) Tanggal 20 Agustus 2025;
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 31) tanggal 19 September 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah :

1. Sebagai arahan dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dari Tahun 2025-2029;
3. Sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BKAD Kabupaten Tapin 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - B. Sumber Daya
 - C. Kinerja Pelayanan
 - D. Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Kelompok Sasaran Pelayanan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Pada Pasal 4 Perda tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah ber Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;

3. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
7. pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (Akuntansi) pengeluaran kas daerah;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
9. Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Memimpin Badan dalam menetapkan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi Badan dan fasilitasi pelaksanaan urusan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan dan Rencana Kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
2. Mengkoordinasi Badan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Mengadakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk mensinkronkan pelaksanaan program / kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah Badan sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
5. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan Juknis penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier pegawai;
6. Menetapkan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi program / kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
7. Menetapkan rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebijakan teknis Bupati dan RPJMD sebagai pedoman perencanaan program lima tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Menetapkan data dan informasi pelaksanaan urusan, program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku untuk bahan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
9. Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
10. Melaksanakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk diajukan ke DPRD Kabupaten

Tapin dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tapin;

11. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk peningkatan dan tertib pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai perundangan yang berlaku dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Tapin;
13. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
14. Melaksanakan pembinaan teknis program dan kegiatan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku agar sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien;
15. Menetapkan Keputusan, Rekomendasi/Edaran Bupati berkenaan dengan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengendalian kesekretariatan dan Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
16. Menetapkan naskah Badan (Surat keluar, Telaahan Staf, Surat Tugas, dll) berkenaan dengan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan dan umum, serta pelaksanaan kegiatan pada Bidang-Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

17. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai petunjuk teknis dan perundangan yang berlaku untuk mengetahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahannya;
18. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
19. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretariat Badan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas mengkoordinasikan membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
- 2) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan;
- 3) merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan keuangan; dan
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan Badan, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan

(3) Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai anggaran

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
2. Menyusun analisa standar belanja;
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancanagan APBD;
4. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD;
5. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
7. Menyusun anggaran kas;
8. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
9. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
10. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- (1) Subbidang Anggaran I

mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah murni

(2) Subbidang Anggaran II

mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah perubahan

(3) Subbidang Anggaran III/JF. Yang Disetarakan

mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan penyusunan KUA dan PPAS daerah

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dan pengelolaan kas umum daerah.

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran kas;
2. Merumuskan rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD);
3. Mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dari SKPD;
4. Menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Merumuskan kebijakan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta pengelolaan investasi daerah;
6. Membuat pedoman pelaksanaan penyertaan modal dan investasi daerah;
7. Melaksanakan penyertaan modal dan investasi atas nama pemerintah daerah;
8. Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
9. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
10. Menyelenggarakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan;
11. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan APBD;

12. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
14. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- (1) Subbidang Perbendaharaan I
mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan anggaran kas, SPD, dan SP2D
- (2) Subbidang Perbendaharaan II
mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah,
- (3) Subbidang Perbendaharaan III/JF. Yang Disetarakan
mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan pembiayaan dan penyertaan modal daerah

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan daerah serta pelaporannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan Rencana Strategis Badan dan program kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan tahun lalu sebagai pedoman kerja ;
2. Melaksanakan koordinasi Badan dan pembinaan teknis dengan instansi / Unit Kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Merumuskan Laporan Realisasi Semester Pertama Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
4. Merumuskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
5. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai prosedur dan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
6. Merumuskan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku untuk penetapan atasan;
7. Melaksanakan penyajian informasi keuangan daerah sesuai prosedur yang berlaku untuk tertib dan akurasi informasi keuangan daerah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- (1) Subbidang Pembukuan
mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pembukuan atas transaksi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- (2) Subbidang Pelaporan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Badan serta kompilasi data keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ JF. Yang Disetarakan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Badan serta

kompilasi data keuangan pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran

6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi pengelolaan Aset Daerah

Uraian tugas Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Membuat pedoman pengelolaan aset/ barang milik daerah;
2. Melakukan penatausahaan aset/ barang milik daerah;
3. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan aset daerah;
4. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
5. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
6. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
7. Melaksanakan koordinasi Badan dalam rangka menghimpun dan mengolah data aset daerah;
8. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah;
9. Menyimpan dokumen/ surat berharga investasi daerah;
10. Melaksanakan koordinasi Badan dalam rangka menghimpun data-data penyertaan modal, investasi dan aset daerah;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari :

- (1) Subbidang Penatausahaan
mempunyai tugas untuk melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah
- (2) Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan/JF. Yang Disetarakan
mempunyai tugas secara administrasi untuk melaksanakan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah
- (3) Subbidang Pemeliharaan dan Pengamanan

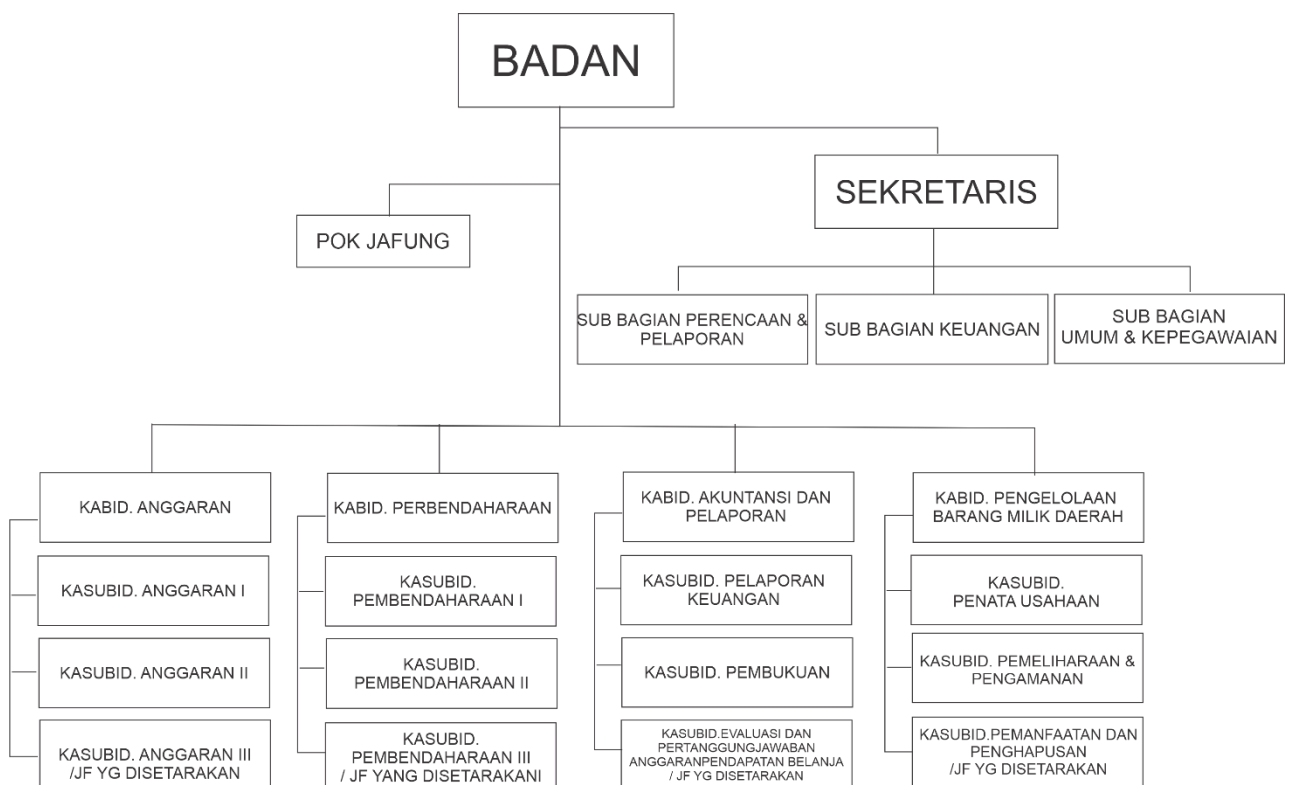
mempunyai tugas merumuskan rincian kebutuhan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKAD Kabupaten Tapin memiliki 4 (tujuh) orang yang mengisi Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, dan 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



B. Sumber Daya BKAD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

1) Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, BKAD Kabupaten Tapin didukung oleh sumber daya aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 40 orang aparatur yang memiliki latar belakang dari berbagai kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan, sebagaimana diuraikan di bawah ini

Komposisi ASN berdasarkan golongan di BKAD Kab.Tapin sebanyak 1 orang golongan II/c, sebanyak 4 orang golongan II/d, sebanyak 2 orang golongan III/a, sebanyak 5 orang golongan III/b, sebanyak 6 orang golongan III/c, sebanyak 7 orang golongan III/d, sebanyak 6 orang golongan IV/a dan 1 orang golongan IV/b.

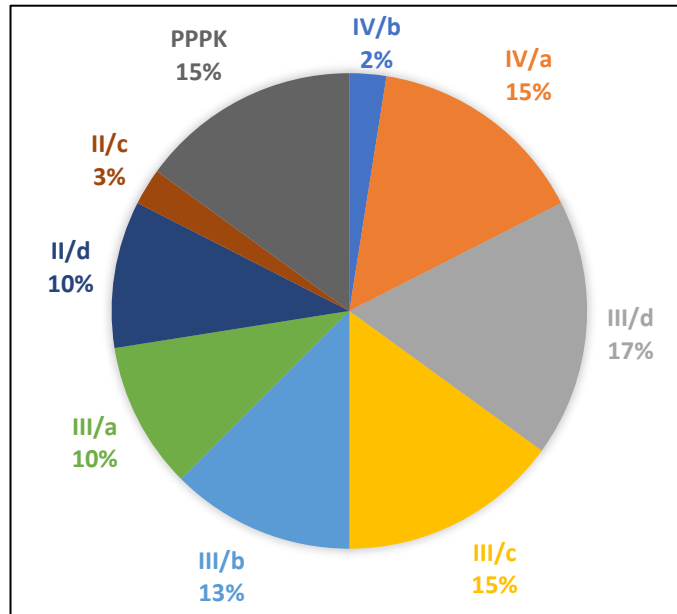
Tabel 2.1

Data ASN Berdasarkan Golongan Ruang

NO	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1.	Pembina Tk.I / IVb	1
2.	Pembina / IVa	6
3.	Penata Tk.I / IIIId	7
4.	Penata / IIIc	6
5.	Penata Muda Tk.I / IIId	5
6.	Penata Muda / IIIa	4
7.	Pengatur Tk.I / IIId	4
8	Pengatur / IIc	1
9	Non Pangkat / Golongaan Ruang (PPPK)	6
JUMLAH		40

Sumber : Umum dan Kepegawaian Bulan Mei 2025 BKAD Kab.Tapin

Gambar 2.2
Persentase ASN Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Umum dan Kepegawaian Bulan Mei 2025 BKAD Kab.Tapin

Komposisi ASN berdasarkan jenis kelamin dan Tingkat pendidikan di BKAD Kab.Tapin yaitu laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan sebanyak 15 orang dengan tingkat pendidikan yaitu 1 orang Doktoral, 9 orang Pasca sarjana, 16 orang Sarjana, 4 orang Diploma, dan 2 orang SLTA

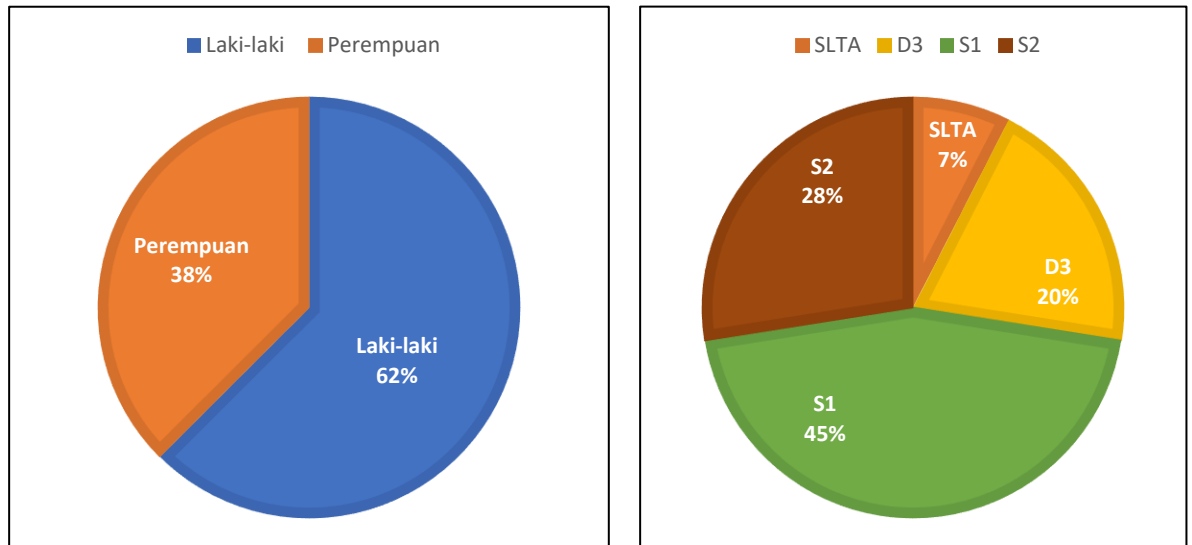
Tabel 2.2
Data ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S2	7	4	11
2	S1	11	7	18
3	D.III	4	4	8
4	SLTA	3	0	3
	JUMLAH	25	15	40

Sumber : Umum dan Kepegawaian Bulan Mei 2025 BKAD Kab.Tapin

Gambar 2.3

Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian Bulan Mei 2025 BKAD Kab.Tapin

Melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tersebut, BKAD Kab.Tapin masih kekurangan aparatur sipil negara jika dibandingkan dengan tugas yang harus dilakukan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, karena hanya mempunyai 40 (empat puluh) ASN. Dari segi Kualitas, BKAD Kab.Tapin mempunyai SDM sangat baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan terkait. Dengan demikian SDM BKAD dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan yang lebih baik lagi.

2) Aset atau Barang Milik Daerah

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Daftar inventaris Barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Barang Milik Daerah BKAD Kab.Tapin

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp)
A	ASET TETAP	807	14.987.044.868
1	Peralatan Dan Mesin	773	5.440.473.333,00
2	Gedung Dan Bangunan	4	9.529.930.735,00
3	ASET TETAP LAIN	30	16.640.800,00
B	ASET TAK BERWUJUD	13	316.637.925,00
1	Lisensi Dan Frenchise	1	2.050.000,00
2	Software	12	314.587.925,00

Sumber : Pengurus Barang Pengguna Bulan Mei 2025 BKAD Kab.Tapin

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BKAD Kabupaten Tapin mempunyai sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik terutama fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3) Standar Operasional dan Prosedur

Untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas, serta meminimalkan kesalahan dan risiko yang mungkin timbul, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut SOP yang dimiliki BKAD sampai saat ini:

- a. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- b. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
- c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Perpajakan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

- d. Penginputan Saldo Awal
- e. Pelaksanaan Inventarisasi Pos-Pos Neraca
- f. Penginputan Jurnal
- g. Penginputan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)
- h. Tukar Menukar Barang Milik Daerah
- i. Penilaian Barang Milik Daerah
- j. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
- k. Pemusnahan Barang Milik Daerah
- l. Penghapusan Barang Milik Daerah
- m. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara
- n. Prosedur Hibah Barang Milik Daerah
- o. Penjualan Barang Milik Daerah Tanpa Lelang
- p. Penjualan Barang Milik Daerah Dengan Lelang
- q. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- r. Peminjaman Sertifikat Tanah Kabupaten
- s. Peminjaman BPKB
- t. Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
- u. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)
- v. Pengumpulan Data Kinerja
- w. Pengukuran Kinerja
- x. Penyusunan LAKIP
- y. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja)
- z. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal

4) Inovasi

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terkait tugas dan fungsi, BKAD membuat inovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi. Inovasi yang ada di BKAD antara lain:

- a. SIMBARA (Sistem Informasi Pembahasan Rencana Anggaran)

- b. Si Kepo SP2D (Sistem Informasi Tiket Perbendaharaan Online SP2D)
- c. Si Bauntung Terintegrasi (Sistem Informasi Bantu Untuk Hitung)
- d. SIJAGAD (Sistem Informasi Jaga Aset Daerah)
- e. E-Pengamanan BMD

C. Kinerja Pelayanan BKAD

Badan Keuanga dan Aset Daerah Kabupaten Tapin merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang milik daerah mulai dari proses penganggaran sampai dengan proses pertanggungjawaban APBD, yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman standar satuan harga, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta Pembinaan teknis, maka cakupan pelayanan BKAD Kab.Tapin diantaranya :

1. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
2. Penyediaan Dokumen aset daerah;
3. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan aset daerah;
4. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
5. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
6. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2025-2029. Data untuk mengisi Tabel Kinerja Pelayanan ini diperoleh dari Penetapan Kinerja BKAD tahun 2025-2029. Berikut tabel ini menampilkan Pencapaian Kinerja Pelayanan BKAD selama tahun 2025-2029.

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD

Indikator Kinerja Utama	2020				2021				2022				2023				2024			
	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Persentase Penetapan APBD Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi								
Tingkat Kepuasan Pelayanan SP2D	92	81,90	89,02%	Tinggi	95	82,10	86,42%	Tinggi	97	83,51	86,09%	Tinggi								
Persentase Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi								
Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	99%	98,73%	99,73%	Sangat Tinggi	99,50%	97,42%	97,91%	Sangat Tinggi	100%	98,08%	98,08%	Sangat Tinggi								
Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja					12%	5,68%	47,33%	Sangat Rendah	12%	32,69%	272,42%	Sangat Tinggi								
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)													75	67,96	86,61%	Tinggi	75	66,977	89,30%	Tinggi
Nilai SAKIP Perangkat Daerah													A	BB	73,25%	Sedang	A	BB	74,60%	Sedang
Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah													60	45,58	75,97%	Sedang	65	75,01	115,40%	Sangat Tinggi

Sumber : LKjIP BKAD Tahun 2020-2024

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi BKAD Lima Tahun Terakhir

Uraian	Anggaran dan Realisasi Pada Tahun Ke- (Rp)									
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	26.974.624.248,08	20.651.819.012,00	11.910.192.491,00	9.514.903.599,00	13.394.004.043,00	12.174.069.037,00	17.269.137.714,00	15.284.608.285,00	19.287.953.629,00	17.599.248.636,00
Belanja Modal	297.975.000,00	284.916.363,00	476.757.300,00	460.400.000,00	1.600.749.100,00	1.572.656.800,00	410.546.214,00	371.890.000,00	638.867.627,00	585.332.000,00

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	0,13	9,75	9,85	9,47	8,31
Rasio PAD	%	0,83	10,10	4,49	6,38	4,48
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	57,51	53,35	55,28	61,26	55,35
Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	89,40	15,26	16,40	25,22	14,86
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	135,76	57,51	14,61	8,14	1,70
Manajemen Aset	%	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	29,36	10,71	7,47	0,19	0,87
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD BKAD Tahun 2022-2024

D. Kelompok Sasaran Pelayanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset milik pemerintah daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKAD memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam sistem keuangan dan aset daerah. Kelompok sasaran pelayanan BKAD Kabupaten terdiri dari:

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

BKAD memberikan layanan administratif dan teknis dalam hal perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Layanan ini mencakup proses penyusunan RKA/DPA, verifikasi SPJ, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pemantauan penggunaan dan pemeliharaan aset daerah.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

BKAD mendukung fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD melalui penyediaan data dan dokumen keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran, neraca, dan dokumen perencanaan keuangan lainnya yang relevan.

c. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten

Sebagai pengelola belanja pegawai, BKAD memberikan pelayanan pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak keuangan ASN lainnya sesuai peraturan yang berlaku, termasuk layanan administrasi perpajakan ASN.

d. Masyarakat Umum

Melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah, BKAD melayani masyarakat dalam penyampaian informasi perihal keuangan dan aset daerah. Layanan ini ditujukan untuk akses transparansi publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e. Pihak Ketiga/Swasta

BKAD juga berinteraksi dengan pihak ketiga seperti rekanan atau penyedia barang dan jasa dalam hal pengelolaan kontrak, pembayaran kegiatan belanja modal dan operasional, serta pengelolaan aset yang dikerjasamakan.

f. Lembaga Pemeriksa dan Pengawas Eksternal

Sebagai entitas yang diaudit, BKAD menjadi narasumber utama dalam proses audit keuangan oleh BPK, pengawasan dari Inspektorat, maupun pemeriksaan dari lembaga pengawas lain, dengan menyediakan dokumen dan penjelasan atas pelaksanaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Melalui pelayanan yang menyeluruh kepada kelompok sasaran tersebut, BKAD Kabupaten berkomitmen mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

E. Mitra BKAD Dalam Memberikan Pelayanan

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Mitra dalam memberikan pelayanan, terdiri dari:

2. MoU antara BKAD dengan PT Lawang Sewu Teknologi tentang Layanan Rack Server Colocation
3. MoU antara BKAD dengan PT Gesit Solusi Teknologi tentang Layanan Sewa Dedicated Server (Cloud Server) untuk dukungan sistem keuangan daerah

F. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mendapat dukungan dari beberapa BUMD, antara lain:

1. Bank Kalsel

G. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Kejaksaan Negeri Tapin tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan

Tata Usaha Negara dan Pengamanan Aset Daerah Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BKAD

A. Permasalahan

Permasalahan Pokok RPJMD Kabupaten Tapin

Permasalahan pokok dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Masih Perlunya Perlunya Optimalisasi Pada Penguatan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif
2. Masih Perlunya Optimalisasi Pada Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan
3. Masih Perlunya Optimalisasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Masih perlunya optimalisasi pada pembangunan SDM yang unggul, kompetitif, dan religius
5. Masih perlunya optimalisasi pada pengentasan Kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat
6. Meningkatnya Intensitas Kerusakan Lingkungan Hidup

Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, dijabarkan dalam permasalahan urusan yang mana BKAD berada pada Urusan Penunjang Keuangan Daerah, dengan identifikasi permasalahannya yaitu:

1. Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
2. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis-RPJMD

Berdasarkan hasil Kajian KLHS-RPJMD pada tahapan pra validasi, Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten terdapat 197 yang relevan, ditambah 1 indikator khas kabupaten (penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan) yang terdiri. Dari 96 indikator TPB

pilar sosial, 50 indikator TPB pilar ekonomi, 31 indikator pilar lingkungan dan 21 indikator TPB pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan data tahun 2012-2023 diketahui bahwa dari 198 indikator TPB terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang mencapai target, 58 indikator TPB (29,29%) belum mencapai target, dan 40 indikator yang belum ada/tidak tersedia datanya.

A. Dengan berdasarkan data yang diperoleh maka hasil identifikasi dan perumusan isu adalah sebagai berikut:

- a. Tata kelola pemerintah
- b. Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia
- c. Ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Iklim
- d. Alih fungsi lahan
- e. Pengelolaan sampah
- f. Pertumbuhan ekonomi/Ekonomi Hijau

B. Dengan rekomendasi strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- b. Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- d. Peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan Ilim
- e. Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder
- f. Pengelolaan sampah
- g. Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah penunjang urusan keuangan ikut berperan dalam mendukung alokasi pendanaan ke sektor yang dianggap perlu untuk percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang terkait langsung dengan implemnetasi RTRW dan KHLs Kabupaten Tapin pada Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

BKAD Kabupaten Tapin berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber dayanya dalam memberikan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga selalu serasi, sinkron dan berkolaborasi.

BKAD Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BKAD Kabupaten Tapin.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja BKAD Kabupaten Tapin dapat dilakukan dengan menggunakan Analisa metode SWOT dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yakni:

1. Strength (Kekuatan)

a. Komitmen Pimpinan dan Staf yang tinggi

Komitmen Pimpinan dan Staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD

b. Sistem dan Teknologi Keuangan Daerah Sudah Digital

Adanya penggunaan aplikasi SIPD, SIPD-BMD, dan Sistem Aplikasi Keuangan dan Aset Daerah lainnya berbasis TIK yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Opini WTP dari BPK

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD menandakan tata kelola keuangan telah berada pada jalur akuntabel dan transparan.

d. Dukungan Regulasi dan SOP yang Memadai

Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang BKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar pelaksanaan tugas secara tertib dan terukur

e. Dukungan Anggaran yang memadai

Dukungan anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKAD

f. Kapasitas SDM Teknis yang cukup di BKAD

Tersedianya tenaga teknis yang kompeten dalam perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan akuntansi.

2. Weaknes (Kelemahan)

a. Kemandirian Fiskal yang Masih Rendah

Ketergantungan pada transfer pusat (DAU/DBH/DAK) masih tinggi sehingga fleksibilitas keuangan daerah terbatas.

b. Perencanaan dan Penganggaran Belum Terintegrasi Penuh dengan Capaian Kinerja

Belum optimalnya sinergi antara dokumen perencanaan (RKPD, Renja) dengan penganggaran (KUA-PPAS, APBD) berbasis hasil dan output.

c. Pengelolaan Aset Belum Maksimal

Inventarisasi dan penatausahaan aset daerah masih menghadapi kendala validasi dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.

d. Rendahnya Penggunaan Data dalam Pengambilan Keputusan Anggaran

Masih terbatasnya pemanfaatan indikator TPB/SDGs dan KLHS dalam menyusun prioritas anggaran.

3. Opportunity (Peluang)

a. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam RPJMD

Menjadi dasar bagi penguatan perencanaan penganggaran yang responsif terhadap dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

- b. Kolaborasi dan Kemitraan Multipihak
Meningkatkan peran BKAD dalam mendorong inovasi pembiayaan daerah melalui skema KPBU, CSR, dan Dana Desa dengan pendekatan kolaboratif.
 - c. Transformasi Digital dalam Layanan Publik dan Keuangan Daerah
Peluang untuk memperluas digitalisasi layanan keuangan dan aset secara terbuka, transparan, dan efisien.
 - d. Pemanfaatan Aset untuk Menambah PAD
Pengelolaan aset daerah yang lebih produktif seperti optimalisasi aset tidur, pemanfaatan BUMD dan kerja sama pihak ketiga.
4. Threats (Tantangan)
- a. Ketidakpastian Transfer Dana Pusat
Fluktuasi kebijakan fiskal nasional dan penurunan dana transfer pusat dapat mengganggu stabilitas APBD.
 - b. Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas yang Semakin Tinggi
Kegagalan dalam memenuhi standar audit, keterbukaan publik, dan pelaporan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat.
 - c. Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam
Dapat memunculkan kebutuhan belanja tidak terduga yang mengganggu struktur anggaran reguler.
 - d. Perubahan Kebijakan Nasional dan Global (Green Economy, SDGs, Smart City)
Menuntut adaptasi cepat BKAD dalam sistem dan mekanisme pembiayaan, pengelolaan aset, serta pelaporan berbasis indikator keberlanjutan.

Semua potensi yang dimiliki harus dapat dimaksimalkan dan digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa aktifitas bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Tapin dan rangka berkontribusi pada pencapaian kinerja utama pemerintah daerah kabupaten tapin.

Berdasarkan analisis SWOT diatas, BKAD Kabupaten Tapin pada periode renstra 2025-2029 akan memprioritaskan upaya pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran
 - Penguatan integrasi perencanaan-penganggaran melalui SIPD.
 - Menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan berbasis program prioritas RPJMD/TPB.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
 - Penyusunan neraca aset yang valid dan akurat.
 - Meningkatkan pemanfaatan aset yang tidak produktif menjadi sumber pendapatan.
3. Penguatan Sistem Informasi Keuangan dan Aset
 - Meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan dengan OPD.
 - Mengembangkan dashboard monitoring realisasi keuangan dan aset berbasis digital.
4. Penguatan Tata Kelola dan SDM BKAD
 - Peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan keuangan, aset, dan pelaporan.
 - Meningkatkan mekanisme evaluasi, pengawasan internal, dan pelaporan keuangan berbasis transparansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapin menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola secara cermat dan strategis. Permasalahan yang muncul, baik bersifat teknis maupun struktural, berpotensi mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan perbaikan dan peningkatan kinerja BKAD. Berikut adalah beberapa **Permasalahan** yang dihadapi BKAD dalam memberikan pelayanan:

- 1) Kualitas SDM yang Belum Merata

Masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi aparatur di lingkungan BKAD, terutama dalam penguasaan sistem informasi keuangan dan aset, regulasi terbaru, serta kemampuan

analitis dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan kualitas pelayanan antar bidang/unit kerja.

2) Kompleksitas Regulasi dan Dinamika Kebijakan Keuangan Daerah

Frekuensi perubahan peraturan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, menuntut BKAD untuk selalu adaptif dan responsif. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam sosialisasi serta pemahaman internal seringkali menghambat kelancaran implementasi kebijakan baru.

3) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi

Sistem informasi keuangan dan aset yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi atau masih mengalami gangguan teknis, yang menghambat efektivitas pelayanan dan kecepatan proses administrasi. Keterbatasan ini juga berpengaruh pada akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

4) Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal

Masih ditemui permasalahan dalam pencatatan, inventarisasi, dan pemanfaatan aset daerah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan OPD pemilik aset, serta kurangnya pemahaman tentang tata kelola barang milik daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.

5) Kepatuhan dan Disiplin Anggaran di OPD

BKAD kerap menghadapi tantangan dalam hal keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, revisi anggaran yang tidak tepat waktu, serta kurangnya kepatuhan OPD terhadap batasan dan ketentuan belanja daerah, yang berdampak pada kualitas laporan dan serapan anggaran.

6) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Masih Perlu Diperkuat

Meskipun sistem pengawasan telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan guna meminimalisasi risiko kesalahan administratif, penyimpangan, serta memperkuat budaya integritas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Isu Strategis

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten memegang peranan penting dalam menjamin terselenggaranya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan daerah serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, BKAD menghadapi sejumlah isu strategis yang harus dijawab melalui kebijakan dan inovasi pelayanan yang tepat. Berikut adalah beberapa isu strategis utama yang dihadapi BKAD dalam memberikan pelayanan:

1) Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan teknis dan manajerial SDM di lingkungan BKAD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi, penguasaan sistem informasi keuangan, serta penyesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan yang terus berkembang.

2) Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data, pelaporan, serta layanan keuangan. Digitalisasi yang terintegrasi antar sistem dan antar perangkat daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.

3) Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif dan Berkelanjutan

Isu strategis terkait pengelolaan aset mencakup perlunya akurasi dalam pencatatan aset, optimalisasi pemanfaatan, serta pengawasan terhadap aset tetap pemerintah daerah. BKAD dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan nilai manfaat aset bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis data menuntut BKAD untuk melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan anggaran, belanja daerah,

pelaporan keuangan melalui pelayanan yang modern dan mudah diakses.

5) Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah

Isu integritas, pengawasan internal, serta keterbukaan informasi publik menjadi perhatian strategis dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

6) Sinergi Antar Lembaga dan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan OPD, DPRD, instansi vertikal, serta pihak ketiga dalam proses pengelolaan keuangan dan aset memerlukan sinergi dan koordinasi yang lebih kuat. Hal ini penting untuk mendorong harmonisasi kebijakan serta kelancaran dalam proses administrasi dan pelayanan publik.

Dari narasi diatas dapat disimpulkan ke dalam tabel yang terdiri dari : potensi daerah yang menjadi kewenangan BKAD, permasalahan BKAD, Isu KLHS yang relevan, Isu lingkungan dinamis yang relevan yang terdiri atas isu global, nasional, dan regional, serta isu strategis BKAD, antara lain:

Tabel 2.7
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Capaian Opini WTP dari BPK atas LKPD 2. Potensi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk PAD	1. Belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran 2. Pengelolaan aset daerah belum maksimal (pencatatan,	1. Tata kelola pemerintahan 2. Pertumbuhan ekonomi / ekonomi hijau	1. Penerapan Green Economy dan keberlanjutan (SDGs) 2. Digitalisasi dan transparansi keuangan	1. Kebijakan fiskal nasional dan fluktuasi dana transfer 2. Perubahan regulasi pengelolaan	1. Rendahnya kemandirian fiskal daerah di wilayah Kalimantan Selatan 2. Penurunan kualitas lingkungan dan potensi bencana	1. Peningkatan kapasitas SDM (teknis dan manajerial) 2. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi keuangan daerah

	validasi, pemanfaatan) 3. Pemanfaatan data (TPB/SDGs, KLHS) dalam pengambilan keputusan masih terbatas 4. Kualitas SDM belum merata 5. Infrastruktur TIK belum sepenuhnya terintegrasi 6. Pengawasan dan pengendalian internal masih lemah 7. Disiplin dan kepatuhan OPD terhadap anggaran masih kurang		berbasis teknologi	keuangan dan aset 3. Tuntutan penguatan akuntabilitas dan keterbukaan publik	3. Kesenjangan antarwilayah dalam layanan dasar dan infrastruktur	3. Pengelolaan aset daerah yang efektif dan berkelanjutan 4. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan 5. Penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan 6. Penguatan sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan
--	--	--	--------------------	---	---	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPJMD Kabupaten Tapin memiliki visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tapin, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“TERWUJUDNYA TAPIN MAJU DAN BERIMAN (BERINTEGRITAS, SEJAHTERA, INOVATIF, AGAMIS, DAN BERKELANJUTAN)”

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tapin di tahun 2029. Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Tapin dijelaskan sebagai berikut.

1. Sejahtera dan Agamis, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tapin yang berkualitas dan sejahtera serta saling berdampingan antar umat beragama.
2. Maju, tercapainya pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan kemandirian ekonomi daerah serta pemenuhan pembangunan infrastruktur yang handal.
3. Berkelanjutan, terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta ketahanan bencana yang responsif.
4. Berintegritas dan inovatif, terwujudnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tapin.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. **MISI 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas dan Berakhlak Mulia, Sehat Jasmani dan Rohani, Beriman dan**

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Mampu Menguasai Teknologi dan Informasi, Pelaksanaan misi ini diimplementasikan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.

2. **MISI 2: Meningkatkan Kemandirian Pengelolaan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata dan Industri Kreatif**, terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM serta optimalisasi pembangunan pariwisata.
3. **MISI 3: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Pengembangan Wilayah dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang**, Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
4. **MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Responsif Terhadap Ketahanan Bencana**, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan ekosistem lingkungan serta peningkatan pengelolaan ketahanan bencana.
5. **MISI 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat**, mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan merit system serta memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang unggul, agamis dan sejahtera
2. Meningkatnya kemandirian ekonomi yang maju, tumbuh dan produktif

3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah
4. Meningkatnya kualitas pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas

Sasaran pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja meningkatnya pembangunan masyarakat yang toleran dan religius
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup akibat perubahan lingkungan
8. Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah
9. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
12. Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi
13. Meningkatnya inovasi daerah dalam akselerasi pencapaian pembangunan
14. Meningkatnya kualitas pengendalian intern pemerintah daerah, dan pemetaan risiko korupsi

Tema pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, yaitu:

1. 2026 : Penguatan SDM yang unggul berlandaskan penataan keseimbangan pemerintah daerah dan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
2. 2027 : Penguatan tata kelola kelembangaan pemerintah menuju ASN yang profesional, regulasi yang efektif, kinerja yang akuntabel dan digitalisasi pelayanan publik.

3. 2028 : Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar berbasis kewilayahan.
4. 2029 : Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan.
5. 2030 : Perwujudan Tapin Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis, Maju dan Berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang lengkap dan modern serta pengembangan kawasan pendidikan di Tapin Selatan
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
3. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
4. Penguatan kualitas Jaminan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Tapin
5. Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM tenaga kesehatan
6. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
7. Peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu dan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial
8. Pengembangan Perusahaan Daerah dalam mendukung kemandirian pembangunan daerah
9. Peningkatan kapasitas dan kualitas wirausaha muda dan pengusaha lokal serta pengusaha kecil dan menengah (UMKM)
10. Pengembangan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata unggulan daerah
11. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan
12. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur perhubungan
13. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan
14. Peningkatan diversifikasi pangan, pemenuhan air minum layak dan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat

15. Perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dan peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus
16. Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim
17. Peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai (ASN & Non ASN) maupun tenaga kemasyarakatan
18. Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
19. Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
20. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah serta penguatan wawasan kebangsaan masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra BKAD 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dalam kerangka pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pengelolaan keuangan dan aset daerah memegang peranan

strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, tujuan pengelolaan keuangan dan aset daerah dirumuskan untuk memastikan terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin kurun waktu 2025 - 2029 dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan BKAD diatas sejalan dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Tapin periode 2025-2029 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas**, pada **Misi ke 5** Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra BKAD 2025-2030

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*.

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan dan aset daerah diarahkan pada pencapaian sasaran sasaran yang terukur, realistis, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, khususnya perangkat yang membidangi urusan keuangan dan aset seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sasaran pengelolaan keuangan dan aset difokuskan pada peningkatan

kualitas, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan dan barang milik daerah.

Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam Periode Renstra 2025-2029 adalah:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah
3. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian
4. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Sasaran BKAD diatas sejalan dengan tujuan Pembangunan Kabupaten Tapin periode 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah** dan **Meningkatnya Birokrasi Yang Berintegritas**, pada **Misi ke 5** Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.

Tujuan dan sasaran renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin dalam Periode Renstra 2025-2029 disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BKAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai SAKIP	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	81	82	82	83	84	

		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	76	77	78	79	80	81	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	68,31	69,65	70,99	72,32	73,66	75	
			Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem integratif yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen kinerja, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

SAKIP tidak hanya menjadi alat pengendalian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sistem ini menekankan pada pentingnya setiap program, kegiatan, dan penggunaan anggaran diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

SAKIP didasarkan pada prinsip bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah adalah amanah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, SAKIP juga menjadi sarana untuk mengurangi pemborosan anggaran (inefisiensi), memacu peningkatan kinerja, dan memperbaiki kualitas layanan publik.

Pelaksanaan SAKIP mengacu pada beberapa regulasi, di antaranya:

- **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- **PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021** tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP terdiri dari lima komponen utama yang saling terkait:

1. **Perencanaan Kinerja:** menyusun tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerjanya.
2. **Pengukuran Kinerja:** menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur serta relevan.
3. **Pelaporan Kinerja:** menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4. **Evaluasi Internal:** melakukan penilaian berkala terhadap capaian kinerja.
5. **Capaian Kinerja:** menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan hasil (outcome).

Tujuan Implementasi SAKIP diantaranya:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Memastikan program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
3. Menyediakan dasar pengambilan keputusan yang berbasis kinerja.
4. Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.

Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPAN-RB). Nilai ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, termasuk efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta orientasi hasil dari setiap kebijakan dan kegiatan.

Penilaian SAKIP bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja birokrasi secara objektif.
2. Menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
4. Menjadi dasar pemberian reward dan punishment dalam sistem manajemen pemerintahan.

Nilai SAKIP diberikan dalam bentuk **skor kuantitatif (0–100)** dan **predikat kualitatif**. Adapun pembagian nilai dan predikatnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai SAKIP

Rentang Nilai	Predikat	Makna Umum
90-100	A (Memuaskan)	Instansi sangat akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil
80-89,99	BB (Sangat Baik)	Instansi akuntabel dan cukup efisien, dengan perencanaan dan pelaporan yang baik
70-79,99	B (Baik)	Akuntabilitas cukup baik, meskipun masih ada ruang perbaikan
60-69,99	CC (Cukup)	Pelaksanaan belum sepenuhnya konsisten, perencanaan dan evaluasi masih lemah
50-59,99	C (Kurang)	Akuntabilitas rendah, penggunaan anggaran belum efisien
< 50	D (Sangat Rendah)	Sangat tidak akuntabel, kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan

Penilaian nilai SAKIP mencakup lima komponen utama:

1. Perencanaan Kinerja
Konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja).
2. Pengukuran Kinerja
Kualitas indikator dan target kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
Ketersediaan dan kualitas Laporan Kinerja (LKjIP).
4. Evaluasi Internal
Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi.
5. Capaian Kinerja
Pencapaian hasil dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana ASN memenuhi standar kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan integritas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

IP-ASN disusun berdasarkan empat dimensi utama profesionalitas ASN, yaitu:

1. Kualifikasi Pendidikan

Mengukur kesesuaian latar belakang pendidikan ASN dengan jabatan yang diemban. Profesionalitas tercermin apabila ASN memiliki pendidikan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kompetensi

Meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dinilai melalui pelatihan dan uji kompetensi. ASN yang kompeten menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.

3. Kinerja

Dilihat dari capaian kinerja individu berdasarkan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai) dan hasil penilaian kinerja tahunan. Semakin tinggi capaian kinerja, semakin tinggi pula indeks profesionalitasnya.

4. **Disiplin dan Etika**

Mengukur kepatuhan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta integritas dan perilaku etis dalam menjalankan tugas.

IP-ASN memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- Sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan SDM aparatur.
- Sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembinaan ASN, termasuk pengembangan karir, promosi, mutasi, dan pelatihan.
- Sebagai indikator akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam aspek penguatan manajemen SDM berbasis merit system.

Penilaian IP-ASN biasanya dilakukan melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber, seperti:

- Data kepegawaian (SIMPEG/SAPK)
- Laporan hasil penilaian kinerja dan uji kompetensi
- Data pendidikan dan pelatihan
- Laporan kedisiplinan dan rekam jejak ASN

Setiap indikator akan diberi bobot tertentu dan dihitung dalam bentuk skor komposit, dengan hasil akhir berupa indeks yang dinyatakan dalam skala 0–100. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin profesional pula kualitas ASN di perangkat daerah tersebut.

Nilai akhir IP-ASN diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat Profesional (nilai 81–100)
2. Profesional (nilai 66–80)
3. Cukup Profesional (nilai 51–65)
4. Kurang Profesional (nilai 0–50)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh, sistematis, dan objektif. IPKD bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui pengukuran IPKD, pemerintah daerah

dapat mengetahui tingkat kematangan pengelolaan keuangannya dan memperbaiki area yang belum optimal.

IPKD disusun berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020** tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa IPKD merupakan bentuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan dengan mengintegrasikan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan berdasarkan pengukuran atas **tujuh dimensi utama** yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Setiap dimensi terdiri dari indikator-indikator yang dinilai menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dari dokumen resmi pemerintah daerah.

Tujuh Dimensi Penilaian IPKD:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - Mengukur konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan penganggaran (KUA-PPAS, APBD).
 - Penilaian mencakup tingkat keterpaduan antar dokumen dan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
 - Menilai proporsi anggaran untuk belanja wajib dan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
 - Dinilai berdasarkan persentase alokasi anggaran terhadap total belanja daerah.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Mengukur keterbukaan informasi keuangan kepada publik.
 - Penilaian dilihat dari keterpenuhan publikasi dokumen keuangan seperti APBD, LRA, dan LKPD pada media resmi pemerintah daerah.
4. Penyerapan Anggaran
 - Mengukur efektivitas realisasi anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan.

- Semakin tinggi persentase realisasi belanja, semakin baik nilai yang diperoleh.
5. Pelaporan Keuangan
 - Menilai ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan keuangan daerah.
 - Indikator yang dinilai antara lain adalah LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, dan Laporan Operasional.
 6. Kondisi Keuangan Daerah
 - Mengukur rasio-rasio keuangan seperti rasio kemandirian fiskal, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan PAD.
 - Bertujuan untuk melihat kesehatan fiskal daerah secara umum.
 7. Opini BPK atas LKPD
 - Mengacu pada opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - Opini tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang memberikan bobot nilai tertinggi dalam penilaian IPKD.

Setiap dimensi diberikan skor tertentu yang kemudian diakumulasi menjadi nilai IPKD total. Nilai akhir IPKD diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat Tinggi (nilai 80–100)
2. Tinggi (nilai 70–79)
3. Sedang (nilai 60–69)
4. Rendah (nilai 50–59)
5. Sangat Rendah (nilai < 50)

Tujuan dari Penilaian IPKD:

1. Memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan daerah.
2. Mendorong perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan keuangan.
3. Menjadi alat pembinaan bagi Kementerian Dalam Negeri.
4. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas pemerintah, seperti kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Opini ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK terhadap laporan keuangan, dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah dan standar pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan utama dari pemberian opini BPK adalah untuk menilai apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini BPK menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Jenis-Jenis Opini BPK:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini adalah opini terbaik yang bisa diterima suatu entitas dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Diberikan jika laporan keuangan secara keseluruhan wajar, namun terdapat beberapa hal yang dikecualikan karena tidak sesuai dengan SAP atau tidak cukup bukti audit.

3. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Diberikan jika laporan keuangan mengandung salah saji material dan tidak disusun sesuai dengan SAP, sehingga tidak menyajikan informasi yang wajar.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

Diberikan jika auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyatakan suatu opini. Ini menunjukkan kelemahan serius dalam pengelolaan keuangan dan transparansi entitas yang diperiksa.

Makna Opini BPK:

Opini BPK bukan merupakan jaminan bahwa tidak terdapat kecurangan atau penyimpangan, tetapi merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan data dan bukti yang diperoleh selama proses audit. Opini ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dan pimpinan lembaga dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Landasan Hukum pelaksanaan Opini BPK didasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

Opini BPK menjadi komponen penting dalam siklus akuntabilitas publik, dan merupakan cerminan dari kinerja tata kelola keuangan suatu entitas pemerintahan. Pemerintah daerah atau lembaga yang konsisten meraih opini WTP umumnya dipandang berhasil dalam pengelolaan keuangan yang baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen akuntansi resmi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja anggaran, serta arus kas dari suatu pemerintah daerah selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran. LKPD disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip **akuntabilitas dan transparansi publik** sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik dan pemangku kepentingan.

Penyusunan LKPD mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akuntansi akrual, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan utama dari penyusunan LKPD adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi strategis LKPD antara lain:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi kepala daerah, DPRD, dan masyarakat.
- Mendukung sistem pengawasan oleh BPK, Inspektorat, dan auditor eksternal.
- Menyediakan informasi bagi pihak eksternal seperti investor, donor, dan lembaga keuangan.

LKPD minimal terdiri dari **tujuh jenis laporan keuangan** sesuai SAP, yaitu:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode tertentu dibandingkan dengan anggarannya.

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Menyajikan informasi mengenai perubahan atas SAL yang mencerminkan sisa anggaran yang dapat digunakan.

3. **Neraca**

Menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir periode pelaporan.

4. **Laporan Operasional (LO)**

Menampilkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional yang bersifat akrual.

5. **Laporan Arus Kas (LAK)**

Menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

6. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Menggambarkan perubahan posisi ekuitas dana selama periode pelaporan.

7. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dan rincian atas angka-angka dalam laporan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPD unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Selanjutnya, LKPD akan diaudit oleh BPK dan menjadi dasar dalam pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah. Hasil opini ini menjadi salah satu indikator kinerja penting dalam penilaian kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Strategi BKAD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 serta, maka strategi BKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 perlu disusun secara sistematis dan selaras dengan prinsip good governance, penguatan birokrasi, dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah strategi BKAD Kabupaten Tapin 2025-2029:

A. Strategi untuk Mencapai Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat

Strategi:

1. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
 - Integrasi dokumen perencanaan kinerja dengan penganggaran dan pelaporan (e-performance based budgeting).
 - Optimalisasi penggunaan aplikasi e-SAKIP dan monitoring evaluasi kinerja.
2. Peningkatan kapasitas SDM BKAD dan perangkat daerah dalam pengelolaan kinerja
 - Pelatihan dan bimbingan teknis penyusunan LKjIP dan cascading kinerja yang tepat.

- Penilaian internal atas keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan dengan tujuan daerah.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah
- Audit internal dan reviu kinerja secara berkala oleh tim pengendali akuntabilitas internal.
4. Penguatan pengawasan intern dan manajemen risiko
- Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko yang terintegrasi.
- B. Strategi untuk Mencapai Tujuan 2: Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Strategi:

1. Kualifikasi
 - Mendorong ASN memiliki latar belakang pendidikan dan jabatan sesuai kebutuhan organisasi
 - Penyelarasan standar kompetensi jabatan dengan NSPK urusan keuangan dan aset daerah
 2. Kompetensi
 - Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan sertifikasi
 3. Kinerja
 - Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis outcome dan indikator terukur
 4. Disiplin dan Etika
 - Meningkatkan budaya kerja profesionalitas dan berintegritas
- C. Strategi untuk Mencapai Tujuan 2: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran: Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Persentase Penyusunan LKPD Tepat Waktu Sesuai SAP

Strategi:

1. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi

- Optimalisasi dan integrasi aplikasi SIPD (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan).
 - Digitalisasi dokumen keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan
 - Supervisi berkala terhadap proses pencatatan, rekonsiliasi dan pelaporan keuangan OPD.
 - Penguatan peran bendahara dan PPK-SKPD melalui pelatihan teknis rutin.
 3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah (BM/D) berbasis data dan teknologi
 - Penertiban, inventarisasi, dan valuasi aset daerah secara digital (E-BMD).
 - Penguatan koordinasi antar-OPD dalam penggunaan dan pemanfaatan aset secara efisien.
 4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - Pembentukan dan penguatan tim tindak lanjut BPK serta pengawasan progresnya melalui dashboard.
 5. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dan penggunaan anggaran
 - Publikasi informasi pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan secara terbuka.
 - Penguatan whistleblowing system dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Sasaran: Persentase Penyusunan LKPD Tepat Waktu Sesuai SAP

Strategi:

1. Sistem dan Mekanisme Penyusunan LKPD
 - Menyusun jadwal tahunan penyusunan LKPD yang terstruktur dan dikawal oleh tim teknis
 - Menggunakan format dan kebijakan akuntansi sesuai aturan yang berlaku
2. Penguatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Antar OPD

- Meningkatkan kualitas dan ketepatan data keuangan melalui rekonsiliasi berkala
 - Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan dan triwulanan antara BUD dan seluruh OPD
 - Rekonsiliasi aset tetap dan kewajiban secara terpusat dan sinkron dengan data SIMDA/SIPD
 - Pendampingan dan supervisi langsung terhadap OPD yang masih bermasalah
3. Peningkatan Kompetensi Tim Penyusun LKPD dan Pengelola Keuangan OPD
- Meningkatkan kapasitas teknis ASN dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
 - Pelatihan teknis SAP akrual, Neraca, LRA, LO, dan LPE
 - Workshop penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - Sertifikasi kompetensi ASN di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4. Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Memastikan penyusunan laporan berbasis sistem yang terintegrasi
 - Monitoring progres input data secara real-time pada aplikasi
 - Dukungan teknis dan troubleshooting aplikasi untuk OPD
5. Penguatan Fungsi Pengawasan Internal / APIP
- Memastikan kualitas laporan melalui Reviu oleh Inspektorat sebelum diserahkan ke BPK
 - Tindak lanjut atas catatan APIP dalam penyempurnaan LKPD
6. Penertiban dan Pembenahan Administrasi Aset Daerah / BMD
- Updating dan verifikasi data aset tetap (bangunan, tanah, kendaraan)
 - Sertifikasi aset tanah dan dokumen legalitas BMD lainnya
 - Inventarisasi ulang aset dengan pendekatan berbasis teknologi

Tabel 3.3 Penahapan Renstra BKAD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Dasar Sistem dan Kapasitas SDM	Integrasi Sistem Informasi dan Penataan Tata Kelola	Optimalisasi dan Akselerasi Capaian Kinerja	Konsolidasi dan Inovasi Pelayanan Keuangan Publik	Kemandirian dan Keberlanjutan Tata Kelola Keuangan Daerah
Startegi	Startegi	Startegi	Startegi	Startegi
1. Evaluasi baseline pengelolaan keuangan dan aset. 2. Penyesuaian sistem informasi keuangan dan aset berbasis SIPD. 3. Pelatihan teknis SDM pengelola keuangan dan barang. 4. Pemetaan awal aset daerah dan penertiban dokumen. 5. Penguatan SAP kepada seluruh OPD. 6. Penguatan SAKIP, SPIP.	7. Integrasi sistem pelaporan keuangan dan manajemen aset daerah. 8. Penguatan fungsi perencanaan, pelaporan berbasis kinerja. 9. Penguatan Implementasi e-SAKIP 10. Pembentukan unit tindak lanjut temuan BPK	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan kas daerah dan belanja berbasis kinerja. 2. Penilaian dan pengendalian aset secara berkala (stock opname digital). 3. Audit internal atas pengelolaan aset dan keuangan. 4. Penerapan indikator kinerja pengelolaan aset dan keuangan berbasis outcome.	1. Inovasi layanan publik berbasis digital keuangan dan aset daerah. 2. Evaluasi komprehensif kinerja pengelolaan keuangan daerah. 3. Pengembangan sistem informasi transparansi APBD dan aset berbasis web. 4. Sertifikasi dan validasi aset strategis daerah.	1. Konsolidasi seluruh capaian dan praktik terbaik pengelolaan keuangan. 2. Penyusunan roadmap penguatan pengelolaan keuangan & aset pasca-RPJMD. 3. Penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur keuangan

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang memandu pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung efektivitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Arah kebijakan BKAD disusun untuk memastikan kontribusi nyata terhadap Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Tapin, yaitu ***“Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.”***

Berikut adalah arah kebijakan BKAD Kabupaten Tapin 2025-2029:

A. Arah Kebijakan untuk untuk Mencapai Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat

Arah Kebijakan:

1. Penguatan sistem manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management)
 - Menyusun indikator kinerja utama yang selaras dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penerapan sistem pengukuran kinerja dan pelaporan yang akurat dan berbasis elektronik
 - Meningkatkan penggunaan aplikasi e-SAKIP secara konsisten.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja dan evaluasi
 - Bimbingan teknis penyusunan perjanjian kinerja, LKjIP, serta evaluasi kinerja berbasis data.
4. Penguatan peran unit pengawasan intern dalam mengawal akuntabilitas
 - Sinergi antara BKAD, Inspektorat, dan Bappelitbang dalam mendorong pencapaian kinerja OPD.

B. Arah Kebijakan untuk untuk Mencapai Tujuan 2: Meningkatkan Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Arah Kebijakan:

5. Implementasi Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN
 - promosi, dan pengembangan ASN berbasis kompetensi dan kinerja.
 - Pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis indikator yang terukur.
6. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi ASN BKAD
 - Pelatihan teknis rutin.
 - Sertifikasi jabatan fungsional dan manajemen keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan untuk untuk Mencapai Tujuan 3: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran: Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, tertib, dan akuntabel
 - Mendorong pelaksanaan anggaran sesuai prinsip value for money dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
2. Penguatan sistem pelaporan keuangan daerah berbasis akrual dan integrasi dengan SIPD
 - Optimalisasi penggunaan SIPD untuk pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan berbasis akrual.
3. Penataan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - Penertiban aset melalui inventarisasi, sertifikasi, pengamanan, dan penghapusan yang tertib.
4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan penguatan pengawasan internal
 - Pembentukan tim tindak lanjut hasil audit dan sistem pelaporan berkala berbasis aplikasi.

Sasaran: Persentase Penyusunan LKPD Tepat Waktu Sesuai SAP

Arah Kebijakan:

1. Penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Terintegrasi (SIPD & SIMDA BMD)
 - Pemanfaatan penuh SIPD untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
 - Updating data barang milik daerah secara periodik melalui SIMDA BMD.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Sesuai SAP
 - Penyusunan LKPD tepat waktu (paling lambat 31 Maret).
 - Rekonsiliasi berkala antar OPD (aset dan keuangan).
3. Penguatan Koordinasi dan Pembinaan Teknis ke OPD

- Pendampingan rutin bendahara dan PPTK dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.
 - Penyusunan pedoman teknis akuntansi dan manajemen aset.
4. Penertiban Aset dan Legalitas Barang Milik Daerah (BMD)
- Sertifikasi tanah aset daerah.
 - Inventarisasi dan verifikasi aset tetap, termasuk penghapusan aset rusak.
5. Audit Internal dan Uji Kepatuhan oleh APIP
- Audit internal terhadap proses keuangan dan pelaporan.
 - Tindak lanjut hasil reviu Inspektorat sebelum audit BPK.

Tabel 3.4 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BKAD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKAD	KET.
1	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP) berbasis akrual	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penerapan penuh SAP berbasis akrual melalui SIPD dan pelaporan yang sesuai standar	
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Peraturan	Penertiban dan optimalisasi aset daerah	Penataan, sertifikasi, dan digitalisasi aset daerah melalui E-BMD	
3	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko	Reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas perangkat daerah	Penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan dan aset	
4	Evaluasi SAKIP secara berkala dan terstandar	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Penguatan pengukuran kinerja melalui integrasi perencanaan-penganggaran dan evaluasi kinerja	
5	Penilaian Opini BPK dan tindak lanjut hasil audit	Perbaikan tata kelola dan peningkatan opini WTP	Penguatan pelaporan keuangan yang akurat serta percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	
6	Pengembangan Kapasitas SDM Keuangan dan Aset	Penguatan SDM aparatur dan reformasi birokrasi	Pelatihan teknis ASN BKAD serta penerapan merit system berbasis kompetensi	
7	Penggunaan aplikasi dan sistem informasi yang terintegrasi	Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola daerah	Integrasi sistem informasi keuangan dan aset untuk mendukung efisiensi dan transparansi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan BKAD dengan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikatif dan lokasi selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2025 sampai dengan 2030, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sub kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029, selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis BKAD tahun 2025-2029. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 harus dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Keselarasan program pembangunan ini semakin penting sebab akan dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja PD disetiap tahunnya.

Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut

dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif BKAD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKAD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Nilai SAKIP		
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2. Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Barang Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			1. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian 2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
						Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
						Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
						Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
						Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Standar Harga	
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	
						Pengamanan Barang Milik Daerah	
						Penilaian Barang Milik Daerah	
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/ Kota	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP : Perencanaan Kinerja	Nilai	23,70	25	14.718.722.311	25	16.190.594.541	25	17.809.653.998	25	19.590.619.395		21.549.681.335		
	Nilai Komponen AKIP : Pengukuran Kinerja	Nilai	23,10	24		25		25		25					
	Nilai Komponen AKIP : Pelaporan Kinerja	Nilai	9,30	12		12		12		12					
	Nilai Komponen AKIP : Evaluasi Internal	Nilai	18,50	20		20		20		21					
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100			
	Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90%	%	95	100		100		100		100		100			
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Nilai	87,16	87,50		88		88,10		88,50		89			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	%	100	100	41.395.420	100	45.534.962	100	50.088.458	100	55.097.304	100	60.607.035		
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	%	100	100		100		100		100		100			
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	4	4	4.138.420	4	4.552.262	4	5.007.488	4	5.508.237	4	6.059.061		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	7	7	37.257.000	7	40.982.700	7	45.080.970	7	49.589.067	7	54.547.974		
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100	100	8.896.874.883	100	9.786.562.371	100	10.765.218.608	100	11.841.740.468	100	13.025.914.516		
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	%	100	100		100		100		100					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	34	34	8.854.599.683	34	9.740.059.651	34	10.714.065.616	34	11.785.472.177	34	12.964.019.395		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	1	1	4.820.200	1	5.302.220	1	5.832.442	1	6.415.686	1	7.057.255		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	18	18	34.833.150	18	38.316.465	18	42.148.112	18	46.362.923	18	50.999.215		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	1	1	2.621.850	1	2.884.035	1	3.172.438	1	3.489.682	1	3.838.651		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	%	100	100	3.274.592.662	100	3.602.051.928	100	3.962.257.123	100	4.358.482.834	100	4.794.331.116		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt	1	1	135.538.480	1	149.092.328	1	164.001.561	1	180.401.717	1	198.441.889		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pkt	1	1	618.881.604	1	680.769.764	1	748.846.741	1	823.731.415	1	906.104.556		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pkt	1	1	10.396.650	1	11.436.315	1	12.579.947	1	13.837.941	1	15.221.735		
Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt	1	1	559.961.050	1	615.957.155	1	677.552.871	1	745.308.158	1	819.838.973		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt	1	1	359.581.508	1	395.539.659	1	435.093.625	1	478.602.987	1	526.463.286		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pkt	1	1	61.268.020	1	67.394.822	1	74.134.304	1	81.547.735	1	89.702.508		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	1	1	108.924.970	1	119.817.467	1	131.799.214	1	144.979.135	1	159.477.049		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1	1	1.420.040.380	1	1.562.044.418	1	1.718.248.860	1	1.890.073.746	1	2.079.081.120		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%	99,49	99,52	314.296.290	99,53	345.725.919	99,54	380.298.511	99,55	418.328.362	99,56	460.161.198		
Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	64	64	314.296.290	64	345.725.919	64	380.298.511	64	418.328.362	64	460.161.198		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	%	100	100	1.353.633.752	100	1.488.997.127	100	1.637.896.840	100	1.801.686.523	100	1.981.855.176		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	16.872.790	12	18.560.069	12	20.416.076	12	22.457.683	12	24.703.452		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	581.981.400	12	640.179.540	12	704.197.494	12	774.617.243	12	852.078.968		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	754.779.562	12	830.257.518	12	913.283.270	12	1.004.611.597	12	1.105.072.756		
Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	%	99,49	99,52	837.929.304	99,53	921.722.234	99,54	1.013.894.458	99,55	1.115.283.904	99,56	1.226.812.294		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	135.929.563	6	149.522.519	6	164.474.771	6	180.922.248	6	199.014.473		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	168.294.107	40	185.123.518	40	203.635.870	40	223.999.457	40	246.399.402		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	533.705.634	1	587.076.197	1	645.783.817	1	710.362.199	1	781.398.419		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	%	-	100	247.435.522.275	100	260.012.662.981	100	270.298.552.052	100	280.963.790.641	100	292.017.526.845		
	Persentase OPD yang Menyusun Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	%	-	100		100		100		100		100			
	Presentase OPD Dengan Penatausahaan Keuangan Sesuai Ketentuan														
	Persentase Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (LRA) yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	%	-	100		100		100		100		100			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP yang tepat waktu dan Sesuai Ketentuan	%	-	100	1.973.238.124	100	2.170.561.937	100	2.387.618.130	100	2.626.379.944	100	2.889.017.938		
	Persentase Penyusunan APBD Yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	%	-	100		100		100		100		100			
	Persentase Penyusunan APBD Perubahan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	%	-	100		100		100		100		100			
Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	81.442.680	2	89.586.948	2	98.545.643	2	108.400.207	2	119.240.228		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dok	2	2	80.515.380	2	88.566.918	2	97.423.610	2	107.165.971	2	117.882.568		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	58	68	11.360.800	68	12.496.880	68	13.746.568	68	15.121.225	68	16.633.347		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	58	68	18.216.000	68	20.037.600	68	22.041.360	68	24.245.496	68	26.670.046		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dok	58	68	40.728.226	68	44.801.049	68	49.281.153	68	54.209.269	68	59.630.196		
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dok	58	68	41.090.346	68	45.199.381	68	49.719.319	68	54.691.251	68	60.160.376		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dok	4	4	807.261.664	4	887.987.830	4	976.786.613	4	1.074.465.275	4	1.181.911.802		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dok	4	4	161.275.400	4	177.402.940	4	195.143.234	4	214.657.557	4	236.123.313		
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dok	4	4	731.347.628	4	804.482.391	4	884.930.630	4	973.423.693	4	1.070.766.062		
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran yang Efektif dan Efisien	%	-	100	1.475.701.865	100	1.623.272.052	100	1.785.599.257	100	1.964.159.181	100	2.160.575.100		
	Persentase Penyerapan Dana Transfer Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	%	-	100		100		100		100					
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dok	52	52	324.608.515	52	357.069.367	52	392.776.303	52	432.053.933	52	475.259.327		
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dok	4	4	101.402.840	4	111.543.124	4	122.697.436	4	134.967.180	4	148.463.898		
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dok	2	3	96.106.560	3	105.717.216	3	116.288.938	3	127.917.831	3	140.709.614		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dok	2	3	148.873.560	3	163.760.916	3	180.137.008	3	198.150.708	3	217.965.779		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dok	17	16	384.222.850	16	422.645.135	16	464.909.649	16	511.400.613	16	562.540.675		
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Org	116	116	420.487.540	116	462.536.294	116	508.789.923	116	559.668.916	116	615.635.807		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	-	100	933.195.890	100	1.026.515.479	100	1.129.167.027	100	1.242.083.730	100	1.366.292.102		
	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LRA) Oleh OPD yang Tepat Waktu	%	-	100		100		100		100					
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Lap	12	12	90.458.500	12	99.504.350	12	109.454.785	12	120.400.264	12	132.440.290		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dok	1	828	27.417.500	828	30.159.250	828	33.175.175	828	36.492.693	828	40.141.962		
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	3	3	24.032.250	3	26.435.475	3	29.079.023	3	31.986.924	3	35.185.617		
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lap	2	90	100.382.480	90	110.420.728	90	121.462.801	90	133.609.081	90	146.969.989		
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dok	2	4	143.550.000	4	157.905.000	4	173.695.500	4	191.065.050	4	210.171.555		
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	0	1	16.032.500	1	17.635.750	1	19.399.325	1	21.339.258	1	23.473.183		
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	0	1	16.032.940	1	17.636.234	1	19.399.857	1	21.339.843	1	23.473.827		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Org	90	90	515.289.720	90	566.818.692	90	623.500.561	90	685.850.617	90	754.435.679		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase administrasi Dana Bantuan Keuangan, Dana Kedaruratan, Dana Bagi Hasil yang diproses sesuai ketentuan	%	100	100	243.053.386.396	100	255.192.313.513	100	264.996.167.638	100	275.131.167.786	100	285.601.641.705		
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Lap	12	12	205.667.774.359	12	214.068.140.272	12	219.759.577.077	12	225.370.918.166	12	230.865.367.122		
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Lap	12	12	27.500.000.000	12	30.250.000.000	12	33.275.000.000	12	36.602.500.000	12	40.262.750.000		
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Lap	12	12	9.885.612.037	12	10.874.173.241	12	11.961.590.561	12	13.157.749.620	12	14.473.524.583		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tercatat dan Terinventarisasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	%	-	100	3.964.607.031	100	4.361.067.734	100	4.797.174.509	100	5.276.891.960	100	5.804.581.156		
	Presentase OPD yang Melakukan Pencatatan Inventarisasi Secara Baik	%	-	100		100		100		100		100			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Aset Perangkat Daerah yang Menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	%	-	100	3.964.607.031	100	4.361.067.734	100	4.797.174.509	100	5.276.891.960	100	5.804.581.156		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Persentase Pengadaan Barang oleh Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	%	-	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Perangkat Daerah	%	-	100		100		100		100					
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dok	2	2	512.241.301	2	563.465.431	2	619.811.974	2	681.793.172	2	749.972.489		
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	0	1	327.098.970	1	359.808.867	1	395.789.754	1	435.368.729	1	478.905.602		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	2	2	429.066.550	2	471.973.205	2	519.170.526	2	571.087.578	2	628.196.336		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Lap	180	180	235.606.250	180	259.166.875	180	285.083.563	180	313.591.919	180	344.951.111		
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Lap	0	45	14.821.180	45	16.303.298	45	17.933.628	45	19.726.991	45	21.699.690		
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Lap	45	45	742.979.930	45	817.277.923	45	899.005.715	45	988.906.287	45	1.087.796.916		
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Lap	3	1	833.602.000	1	916.962.200	1	1.008.658.420	1	1.109.524.262	1	1.220.476.688		
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	98	90	390.365.800	90	429.402.380	90	472.342.618	90	519.576.880	90	571.534.568		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME /KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Lap	180	180	41.245.600	180	45.370.160	180	49.907.176	180	54.897.894	180	60.387.683		
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Lap	2	2	24.956.690	2	27.452.359	2	30.197.595	2	33.217.354	2	36.539.090		
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Org	180	180	412.622.760	180	453.885.036	180	499.273.540	180	549.200.894	180	604.120.983		
TOTAL PAGU					266.118.851.617		280.564.325.256		292.905.380.559		305.831.301.996		319.371.789.336		

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Dengan Capaian Kinerja >90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Nilai Komponen AKIP	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Barang Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Penyusunan Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan 2. Persentase OPD yang Menyusun Anggaran Yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan 4. Presentase OPD Dengan Penatausahaan Keuangan Sesuai Ketentuan 5. Persentase Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD (LRA) yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
			Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Tepat Waktu 2. Presentase OPD yang Melakukan Pencatatan Inventarisasi Secara Baik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Standar Harga	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	
			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/ Kota	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	81	82	82	83	84	
2	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	76	77	78	79	80	81	
3	Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
2	Rasio PAD	%	6,4	6,5	6,7	7,2	7,5	8	
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	55,89	56,45	57,02	57,59	58,16	58,74	
4	Opini Laporan Keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	10	8	7	6,5	6	5	
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,5	1,2	1,2	1	1	1	
7	Manajemen Aset	%	4	4	4	4	4	4	
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2025-2029, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

BUPATI TAPIN,

YAMANI

LAMPIRAN

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	66,98	68	70	72	73	74	75	
			Nilai SAKIP (poin)	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)	66,98	68	70	72	73	74	75	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	74,6	80	81	82	82	83	84	
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					266.118.851.617		280.564.325.256		292.905.380.559		305.831.301.996		319.371.789.336	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.718.722.311		16.190.594.541		17.809.653.998		19.590.619.395		21.549.681.335	
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	100	3.588.888.952	100	3.947.777.847	100	4.342.555.634	100	4.776.811.196	100	5.254.492.314	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,6	80	81	8.938.270.303	82	9.832.097.333	82	10.815.307.066	83	11.896.837.772	84	13.086.521.551	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	100	2.191.563.056	100	2.410.719.361	100	2.651.791.298	100	2.916.970.427	100	3.208.667.470	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					247.435.522.275		260.012.662.981		270.298.552.052		280.963.790.641		292.017.526.845	
Menigkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	243.053.386.396	100	255.192.313.513	100	264.996.167.638	100	275.131.167.786	100	285.601.641.705	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	100	1.475.701.865	100	1.623.272.052	100	1.785.599.257	100	1.964.159.181	100	2.160.575.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase pembahasan anngaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%) (%)	100	100	100	1.973.238.124	100	2.170.561.937	100	2.387.618.130	100	2.626.379.944	100	2.889.017.938	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	100	100	100	933.195.890	100	1.026.515.479	100	1.129.167.027	100	1.242.083.730	100	1.366.292.102	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.964.607.031		4.361.067.734		4.797.174.509		5.276.891.960		5.804.581.156	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart (%)	100	100	100	3.964.607.031	100	4.361.067.734	100	4.797.174.509	100	5.276.891.960	100	5.804.581.156	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					266118851617.00		280564325256.00		292905380559.00		305831301996.00		319371789336.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah								
- Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)			
					Nilai SAKIP (poin)			
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (poin)			
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)			
					Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)			
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)			
					Persentase pembahasan anggaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%) (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
					Meningkatnya Kualitas Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
		Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
					Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD/APBDP	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	66,98	68	70	72	73	74	75	
2	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pembahasan anggaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	%	0	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				266.118.851.617		280.564.325.256		292.905.380.559		305.831.301.996		319.371.789.336		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.718.722.311		16.190.594.541		17.809.653.998		19.590.619.395		21.549.681.335		
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%)	100	100	3.588.888.952	100	3.947.777.847	100	4.342.555.634	100	4.776.811.196	100	5.254.492.314	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.274.592.662		3.602.051.928		3.962.257.123		4.358.482.834		4.794.331.116		
Meningkatnya Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.274.592.662	1	3.602.051.928	1	3.962.257.123	1	4.358.482.834	1	4.794.331.116		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				135.538.480		149.092.328		164.001.561		180.401.717		198.441.889		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	135.538.480	1	149.092.328	1	164.001.561	1	180.401.717	1	198.441.889		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				618.881.604		680.769.764		748.846.741		823.731.415		906.104.556		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	618.881.604	1	680.769.764	1	748.846.741	1	823.731.415	1	906.104.556		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.396.650		11.436.315		12.579.947		13.837.941		15.221.735		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.396.650	1	11.436.315	1	12.579.947	1	13.837.941	1	15.221.735		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				559.961.050		615.957.155		677.552.871		745.308.158		819.838.973		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	559.961.050	1	615.957.155	1	677.552.871	1	745.308.158	1	819.838.973		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				359.581.508		395.539.659		435.093.625		478.602.987		526.463.286		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	359.581.508	1	395.539.659	1	435.093.625	1	478.602.987	1	526.463.286		
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				61.268.020		67.394.822		74.134.304		81.547.735		89.702.508		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	61.268.020	1	67.394.822	1	74.134.304	1	81.547.735	1	89.702.508		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				108.924.970		119.817.467		131.799.214		144.979.135		159.477.049		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	108.924.970	1	119.817.467	1	131.799.214	1	144.979.135	1	159.477.049		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.420.040.380		1.562.044.418		1.718.248.860		1.890.073.746		2.079.081.120		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.420.040.380	1	1.562.044.418	1	1.718.248.860	1	1.890.073.746	1	2.079.081.120		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				314.296.290		345.725.919		380.298.511		418.328.362		460.161.198		
Meningkatnya Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	64	64	314.296.290	64	345.725.919	64	380.298.511	64	418.328.362	64	460.161.198		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				314.296.290		345.725.919		380.298.511		418.328.362		460.161.198		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	64	64	314.296.290	64	345.725.919	64	380.298.511	64	418.328.362	64	460.161.198		
Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Angka)	74,6	81	8.938.270.303	82	9.832.097.333	82	10.815.307.066	83	11.896.837.772	84	13.086.521.551		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.395.420		45.534.962		50.088.458		55.097.304		60.607.035		
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	41.395.420	7	45.534.962	7	50.088.458	7	55.097.304	7	60.607.035		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.138.420		4.552.262		5.007.488		5.508.237		6.059.061		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4.138.420	4	4.552.262	4	5.007.488	4	5.508.237	4	6.059.061		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				37.257.000		40.982.700		45.080.970		49.589.067		54.547.974		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	37.257.000	7	40.982.700	7	45.080.970	7	49.589.067	7	54.547.974		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.896.874.883		9.786.562.371		10.765.218.608		11.841.740.468		13.025.914.516		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	8.896.874.883	34	9.786.562.371	34	10.765.218.608	34	11.841.740.468	34	13.025.914.516		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.854.599.683				9.740.059.651			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	34	34	8.854.599.683	34	9.740.059.651	34	10.714.065.616	34	11.785.472.177	34	12.964.019.395		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.820.200		5.302.220		5.832.442		6.415.686		7.057.255		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.820.200	1	5.302.220	1	5.832.442	1	6.415.686	1	7.057.255		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				34.833.150		38.316.465		42.148.112		46.362.923		50.999.215		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	34.833.150	18	38.316.465	18	42.148.112	18	46.362.923	18	50.999.215		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.621.850		2.884.035		3.172.438		3.489.682		3.838.651		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2.621.850	1	2.884.035	1	3.172.438	1	3.489.682	1	3.838.651		
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat (Nilai)	100	100	2.191.563.056	100	2.410.719.361	100	2.651.791.298	100	2.916.970.427	100	3.208.667.470		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.353.633.752		1.488.997.127		1.637.896.840		1.801.686.523		1.981.855.176		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian ASN Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.353.633.752	12	1.488.997.127	12	1.637.896.840	12	1.801.686.523	12	1.981.855.176		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16.872.790		18.560.069		20.416.076		22.457.683		24.703.452		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	16.872.790	12	18.560.069	12	20.416.076	12	22.457.683	12	24.703.452		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				581.981.400		640.179.540		704.197.494		774.617.243		852.078.968		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	581.981.400	12	640.179.540	12	704.197.494	12	774.617.243	12	852.078.968		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				754.779.562		830.257.518		913.283.270		1.004.611.597		1.105.072.756		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	754.779.562	12	830.257.518	12	913.283.270	12	1.004.611.597	12	1.105.072.756		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				837.929.304		921.722.234		1.013.894.458		1.115.283.904		1.226.812.294		
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	837.929.304	40	921.722.234	40	1.013.894.458	40	1.115.283.904	40	1.226.812.294		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				135.929.563		149.522.519		164.474.771		180.922.248		199.014.473		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	135.929.563	6	149.522.519	6	164.474.771	6	180.922.248	6	199.014.473		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				168.294.107		185.123.518		203.635.870		223.999.457		246.399.402		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	168.294.107	40	185.123.518	40	203.635.870	40	223.999.457	40	246.399.402		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				533.705.634		587.076.197		645.783.817		710.362.199		781.398.419		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	533.705.634	1	587.076.197	1	645.783.817	1	710.362.199	1	781.398.419		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				247.435.522.275		260.012.662.981		270.298.552.052		280.963.790.641		292.017.526.845		
Menigkatnya Kualitas Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	243.053.386.396	100	255.192.313.513	100	264.996.167.638	100	275.131.167.786	100	285.601.641.705	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				243.053.386.396		255.192.313.513		264.996.167.638		275.131.167.786		285.601.641.705		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diproses sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	243.053.386.396	12	255.192.313.513	12	264.996.167.638	12	275.131.167.786	12	285.601.641.705		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				205.667.774.359		214.068.140.272		219.759.577.077		225.370.918.166		230.865.367.122		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12	12	205.667.774.359	12	214.068.140.272	12	219.759.577.077	12	225.370.918.166	12	230.865.367.122		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				27.500.000.000		30.250.000.000		33.275.000.000		36.602.500.000		40.262.750.000		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12	12	27.500.000.000	12	30.250.000.000	12	33.275.000.000	12	36.602.500.000	12	40.262.750.000		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				9.885.612.037		10.874.173.241		11.961.590.561		13.157.749.620		14.473.524.583		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	9.885.612.037	12	10.874.173.241	12	11.961.590.561	12	13.157.749.620	12	14.473.524.583		
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan (%)	0	100	1.475.701.865	100	1.623.272.052	100	1.785.599.257	100	1.964.159.181	100	2.160.575.100		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.475.701.865		1.623.272.052		1.785.599.257		1.964.159.181		2.160.575.100		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4	906.340.765	4	996.974.842	4	1.096.672.326	4	1.206.339.557	4	1.326.973.514		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	52	52		52		52		52		52			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	16	16		16		16		16		16			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				324.608.515		357.069.367		392.776.303		432.053.933		475.259.327		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	52	52	324.608.515	52	357.069.367	52	392.776.303	52	432.053.933	52	475.259.327		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				101.402.840		111.543.124		122.697.436		134.967.180		148.463.898		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4	101.402.840	4	111.543.124	4	122.697.436	4	134.967.180	4	148.463.898		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				96.106.560		105.717.216		116.288.938		127.917.831		140.709.614		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	2	2	96.106.560	2	105.717.216	2	116.288.938	2	127.917.831	2	140.709.614		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				384.222.850		422.645.135		464.909.649		511.400.613		562.540.675		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	16	16	384.222.850	16	422.645.135	16	464.909.649	16	511.400.613	16	562.540.675		
Meningkatnya Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	3	3	148.873.560	3	163.760.916	3	180.137.008	3	198.150.708	3	217.965.779		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				148.873.560		163.760.916		180.137.008		198.150.708		217.965.779		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	3	3	148.873.560	3	163.760.916	3	180.137.008	3	198.150.708	3	217.965.779		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	116	116	420.487.540	116	462.536.294	116	508.789.923	116	559.668.916	116	615.635.807		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				420.487.540		462.536.294		508.789.923		559.668.916		615.635.807		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	116	116	420.487.540	116	462.536.294	116	508.789.923	116	559.668.916	116	615.635.807		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase pembahasan anngaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%) (%)	100	100	1.973.238.124	100	2.170.561.937	100	2.387.618.130	100	2.626.379.944	100	2.889.017.938		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.973.238.124		2.170.561.937		2.387.618.130		2.626.379.944		2.889.017.938		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD/APBDP	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68	1.811.280.064	68	1.992.408.071	68	2.191.648.877	68	2.410.813.766	68	2.651.895.142		
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	4		4		4		4					
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68		68		68		68					
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	4	4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68		68		68		68		68			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68		68		68		68		68			
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				11.360.800		12.496.880		13.746.568		15.121.225		16.633.347		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68	11.360.800	68	12.496.880	68	13.746.568	68	15.121.225	68	16.633.347		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				18.216.000		20.037.600		22.041.360		24.245.496		26.670.046		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68	18.216.000	68	20.037.600	68	22.041.360	68	24.245.496	68	26.670.046		
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				40.728.226		44.801.049		49.281.153		54.209.269		59.630.196		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68	40.728.226	68	44.801.049	68	49.281.153	68	54.209.269	68	59.630.196		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				41.090.346		45.199.381		49.719.319		54.691.251		60.160.376		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	68	68	41.090.346	68	45.199.381	68	49.719.319	68	54.691.251	68	60.160.376		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				807.261.664		887.987.830		976.786.613		1.074.465.275		1.181.911.802		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	4	4	807.261.664	4	887.987.830	4	976.786.613	4	1.074.465.275	4	1.181.911.802		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				161.275.400		177.402.940		195.143.234		214.657.557		236.123.313		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	4	4	161.275.400	4	177.402.940	4	195.143.234	4	214.657.557	4	236.123.313		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				731.347.628		804.482.391		884.930.630		973.423.693		1.070.766.062		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	4	731.347.628	4	804.482.391	4	884.930.630	4	973.423.693	4	1.070.766.062		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	161.958.060	2	178.153.866	2	195.969.253	2	215.566.178	2	237.122.796		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				81.442.680		89.586.948		98.545.643		108.400.207		119.240.228		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	81.442.680	2	89.586.948	2	98.545.643	2	108.400.207	2	119.240.228		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				80.515.380		88.566.918		97.423.610		107.165.971		117.882.568		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	80.515.380	2	88.566.918	2	97.423.610	2	107.165.971	2	117.882.568		
Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (%)	100	100	933.195.890	100	1.026.515.479	100	1.129.167.027	100	1.242.083.730	100	1.366.292.102		
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				933.195.890		1.026.515.479		1.129.167.027		1.242.083.730		1.366.292.102		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Yang Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	765.613.640	12	842.175.004	12	926.392.504	12	1.019.031.756	12	1.120.934.930		
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	90	90		90		90		90		90			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	90	90		90		90		90					
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	828	828		828		828		828		828			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				90.458.500		99.504.350		109.454.785		120.400.264		132.440.290		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	90.458.500	12	99.504.350	12	109.454.785	12	120.400.264	12	132.440.290		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				27.417.500		30.159.250		33.175.175		36.492.693		40.141.962		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	828	828	27.417.500	828	30.159.250	828	33.175.175	828	36.492.693	828	40.141.962		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				100.382.480		110.420.728		121.462.801		133.609.081		146.969.989		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	90	90	100.382.480	90	110.420.728	90	121.462.801	90	133.609.081	90	146.969.989		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				16.032.500		17.635.750		19.399.325		21.339.258		23.473.183		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	16.032.500	1	17.635.750	1	19.399.325	1	21.339.258	1	23.473.183		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				16.032.940		17.636.234		19.399.857		21.339.843		23.473.827		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	16.032.940	1	17.636.234	1	19.399.857	1	21.339.843	1	23.473.827		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				515.289.720		566.818.692		623.500.561		685.850.617		754.435.679		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	90	90	515.289.720	90	566.818.692	90	623.500.561	90	685.850.617		754.435.679		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LRA)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	167.582.250	4	184.340.475	4	202.774.523	4	223.051.974	4	245.357.172		
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3	3				3		3		3			
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				24.032.250		26.435.475		29.079.023		31.986.924		35.185.617		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3	3	24.032.250	3	26.435.475	3	29.079.023	3	31.986.924	3	35.185.617		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				143.550.000		157.905.000		173.695.500		191.065.050		210.171.555		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	143.550.000	4	157.905.000	4	173.695.500	4	191.065.050	4	210.171.555		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.964.607.031		4.361.067.734		4.797.174.509		5.276.891.960		5.804.581.156		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart (%)	100	100	3.964.607.031	100	4.361.067.734	100	4.797.174.509	100	5.276.891.960	100	5.804.581.156	5.02.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.964.607.031		4.361.067.734		4.797.174.509		5.276.891.960		5.804.581.156		
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	1.268.406.821	2	1.395.247.503	2	1.534.772.254	2	1.688.249.479	2	1.857.074.427		
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				512.241.301		563.465.431		619.811.974		681.793.172		749.972.489		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	512.241.301	2	563.465.431	2	619.811.974	2	681.793.172	2	749.972.489		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				327.098.970		359.808.867		395.789.754		435.368.729		478.905.602		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	327.098.970	1	359.808.867	1	395.789.754	1	435.368.729	1	478.905.602		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				429.066.550		471.973.205		519.170.526		571.087.578		628.196.336		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	429.066.550	2	471.973.205	2	519.170.526	2	571.087.578	2	628.196.336		
Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	45	45	316.629.720	45	348.292.692	45	383.121.962	45	421.434.158	45	463.577.574		
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	180	180		180		180		180		180			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	180	180		180		180		180		180			
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				235.606.250		259.166.875		285.083.563		313.591.919		344.951.111		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	180	180	235.606.250	180	259.166.875	180	285.083.563	180	313.591.919	180	344.951.111		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				14.821.180		16.303.298		17.933.628		19.726.991		21.699.690		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	45	45	14.821.180	45	16.303.298	45	17.933.628	45	19.726.991	45	21.699.690		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				41.245.600		45.370.160		49.907.176		54.897.894		60.387.683		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	180	180	41.245.600	180	45.370.160	180	49.907.176	180	54.897.894	180	60.387.683		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				24.956.690		27.452.359		30.197.595		33.217.354		36.539.090		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	2	24.956.690	2	27.452.359	2	30.197.595	2	33.217.354	2	36.539.090		
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	45	45	1.966.947.730	45	2.163.642.503	45	2.380.006.753	45	2.618.007.429	45	2.879.808.172		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	90	90		90		90		90		90			
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				742.979.930		817.277.923		899.005.715		988.906.287		1.087.796.916		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	45	45	742.979.930	45	817.277.923	45	899.005.715	45	988.906.287	45	1.087.796.916		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				833.602.000		916.962.200		1.008.658.420		1.109.524.262		1.220.476.688		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	833.602.000	1	916.962.200	1	1.008.658.420	1	1.109.524.262	1	1.220.476.688		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				390.365.800		429.402.380		472.342.618		519.576.880		571.534.568		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	90	90	390.365.800	90	429.402.380	90	472.342.618	90	519.576.880	90	571.534.568		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	180	180	412.622.760	180	453.885.036	180	499.273.540	180	549.200.894	180	604.120.983		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				412.622.760		453.885.036		499.273.540		549.200.894		604.120.983		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	180	180	412.622.760	180	453.885.036	180	499.273.540	180	549.200.894	180	604.120.983		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	66,98	68	70	72	73	74	75	
3.	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,6	80	81	82	82	83	84	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	positif	poin	66,98	68	70	72	73	74	75	
3.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase pembahasan anngaran tepat waktu sesuai siklus anggaran (%)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan Anggaran yang Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	